

**KEBIJAKAN KEPERMIMPINAN
UIN SUNAN KALIJAGA
PERIODE 2016-2020 DALAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN TINGGI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**



Oleh: Riyan
NIM: 18204090010

TESIS
Diajukan kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Yogyakarta
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyan
NIM : 18204090010
Jenjang : Magister (S2)
Program Study : Manajemen Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Riyan, S.Pd

NIM: 18204090010



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyand

NIM : 18204090010

Jenjang : Magister (S2)

Program Study : Manajemen Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Riyand, S.Pd

NIM:18204090010

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474 Fax. (0274) 58611
Tarloyah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGESAHAN
Nomor: B-141/Un.05/DT.PP.9/07/2020

Tesis Berjudul: Kebijakan Kepemimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Periode 2016-2020 dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Perspektif Maqashid Syari'ah

Nama : Riyan

NIM : 18204090010

Program Study : Manajemen Pendidikan Islam

Tanggal Ujian : 8 Juni 2020

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Dekan



Dr. Ahmad Arifi, M. Ag.
NIP. 19661121 199203 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul: Kebijakan Kepemimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Periode 2016-2020 dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Perspektif Maqashid
Syari'ah

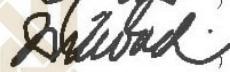
Nama : Riyand

NIM : 18204090010

Program Study : Manajemen Pendidikan Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Zainal Arifin, M.S.I ()

Penguji : Dr. H. Suwadi, S.Ag.,M.Ag.,M.Pd ()

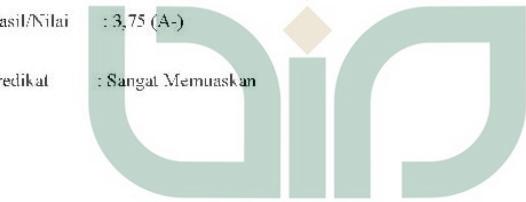
Penguji : Dr. Subiyantoro, M.Ag. ()

dilaksukan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2020

Waktu : 13.00 s.d 14.00

Hasil/Nilai : 3,75 (A-)

Predikat : Sangat Memuaskan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

**Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Kebijakan Kepemimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Periode 2016-2020 dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Perspektif Maqashid Syari'ah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyam
NIM : 18204090010
Jenjang : Magister (S2)
Program Study : Manajemen Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk dinilai dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd).

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 13 Mei 2020

Pembimbing,

Dr. Zainel Arifin, M.Si

NIP.19800324 200912 1 002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحَهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Dari Abdullah, Nabi bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.¹

¹ Risalah Muslim.id,”HR.Bukhari:4789-TentangSetiap Kalian Adalah Pemimpin”, dalam <https://risalahmuslim.id/setiap-kalian-adalah-pemimpin/>, diakses tanggal 2 Mei 2020.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



INTISARI

Riyan. 18204090010. Kebijakan Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga Periode 2016-2020 dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Perspektif Maqashid Syari'ah. Tesis Magister, Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Penetapan kebijakan lembaga pendidikan tidak terlepas dari peran pemerintah dan peran stakeholder institusi. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun yang berwenang telah memikirkan dampak dan kemaslahatan dari sebuah kebijakan. Penelitian kebijakan pimpinan UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020 dianalisis dengan kaidah maqashid syari'ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data penelitian menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, display data dan simpulan/verifikasi data. Peneliti melakukan triangulasi sebagai bentuk teknik pengumpulan data untuk menguji keabsahan data dan informasi dengan cara menemui informan yang mengetahui, mengalami dan melakukan.

Hasil penelitian ini (1) peran dan sumber kebijakan perguruan tinggi Islam terbagi dua pertama dari Kementerian Agama dan kedua dari institusi dalam hal ini UIN Sunan Kalijaga. Peran dan fungsi Kementerian Agama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; pelaksanaan kegiatan teknis teknis yang berskala nasional dan daerah; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.

UIN Sunan Kalijaga memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan. Dalam hal ini Rektor dibantu oleh tiga Wakil Rektor dalam menetapkan sebuah kebijakan. (2) Analisis kebijakan UIN Sunan Kalijaga perspektif maqashid syari'ah diantaranya kebijakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), kebijakan pelarangan memakai cadar dan kebijakan pondok pesantren satu tahun bagi mahasiswa baru. Ketiga kebijakan tersebut dianalisis dengan melihat kemaslahatannya dari segi hifzuddin (melestarikan agama), hifzun nafs (melestarikan jiwa), hifzu aql (melestarikan akal), hifzul nasl/irdi (melestarikan keturunan dan kehormatan dan hifzul mal (melestarikan harta).

Kata Kunci: Peran dan Sumber Kebijakan, Kebijakan Perspektif Maqashid Syari'ah



ABSTRACT

Riyan. 18204090010. UIN Sunan Kalijaga Leadership Policy 2016-2020 period in the management of higher education perspective of Maqashid Syari'ah. Master's thesis, Islamic Education management Faculty of Tarbiyah and teaching UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

The institution's policy setting is not detached from the role of government and institutional stakeholders. Any policy stipulated by the Government or the authorities has contemplated the impact and benefit of a policy. The policy research of UIN Sunan Kalijaga 2016-2020 period was analyzed with the principle of Maqashid Syari'ah.

This study uses a qualitative descriptive approach. The data collection techniques in this study are observations, interviews and documentation. The analysis technique of research data using three steps is data reduction, data display and data verification. Researchers are triangulated as a form of data collection techniques to test the validity of data and information by meeting the informant who knows, experiences and performs.

The results of this research (1) the role and source of the policy of Islamic universities is divided into the first two of the Ministry of Religious Affairs and the two institutions in this case UIN Sunan Kalijaga. The role and function of the Ministry of Religion is the formulation, establishment, and implementation of policy in religious areas; Implementation of technical activities of national and local scale; The management of the State's property that is the responsibility of the Ministry of Religious Affairs; Implementation of technical guidance and supervision on the implementation of the Ministry of Religious Affairs in the region; and supervision over the implementation of duties in the Ministry of Religious Environment. UIN Sunan Kalijaga has authority in taking policy. In this case the Rector was assisted by three Vice-

rector in establishing a policy. (2) policy Analysis of UIN Sunan Kalijaga Islamic Maqashid perspectives including the introduction of academic and student culture (PBAK), policies prohibiting wear veil and policy of boarding school one year for new students. The three policies are analyzed by looking at the benefits in terms of Hifzuddin (preserving religion), Hifzun nafs (Preserve the Soul), Hifzu aql (Preserve reason), Hifzul NASL/Irdi (preserving descendants and honors and Hifzul Mal (Preserve treasures).

Keywords: Role and Policy Resource, Leadership Style, Policy Perspective Maqashid Syari'ah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti sadar bahwa dalam proses pembuatan dan penyusunan tesis ini tidak lepas dari campur tangan dan pertolongan Allah SWT. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para tabiin, semoga kita mendapatkan syafaatnya.

Sebagai peneliti Tesis yang berjudul “Kebijakan Kepemimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Periode 2016-2020 dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Perspektif Maqashid Syari’ah”, memohon maaf jikalau dalam penulisan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan, arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad Arifi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.

2. Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Dr. H. Sumedi, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberi kelancaran, motivasi dan masukan selama peneliti menempuh studi sampai selesaiya tesis ini.
3. Dr. Sedya Santosa, SS, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan akademik berupa motivasi dan arahan selama peneliti menempuh studi selama ini.
4. Dr. Zainal Arifin, M.SI selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya, serta yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan doa untuk kelancaran penyusunan tesis ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan sabar telah mendidik dan membimbing peneliti selama menempuh studi.
6. Kepada kedua orang tua, Ayah Yudilson dan Ibu Yurnida serta tiga Kakak Dodi Chandra, Toni Suhendra, Andri Ady dan Adik Putri Ayuni yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada peneliti.
7. Kepada seluruh mahasiswa MPI angkatan 2018 yang telah menemani, membantu, memotivasi peneliti

selama kurang lebih empat tahun dalam menuntut ilmu sehingga selesainya tugas akhir ini.

8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan yang telah diberikan dapat dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 12 Mei 2020
Peneliti,



Riyan, S.Pd
NIM. 18204090010



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBERAHAN	viii
INTISARI	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Teoritis	35
1. Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan	35
2. Konsep Kebijakan Pendidikan	39
3. Konsep Maqashid Syari'ah	44
G. Metode Penelitian	50

1. Jenis Penelitian.....	50
2. Subjek Penelitian.....	50
3. Lokasi dan Waktu	52
4. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi....	53
5. Teknik Analisis Data.....	55
6. Pengujian Keabsahan Data.....	58
H. Sistematika Pembahasan.....	59
BAB II GAMBARAN UMUM UIN SUNAN KALIJAGA.....	
A. Sejarah Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga	61
B. Visi Misi Tujuan dan Core Values UIN Sunan Kalijaga	65
BAB III PEMBAHASAN	68
A. Peran Sumber Alur Penetapan Kebijakan UIN SUKA.....	68
1. Peran Kementerian Agama dalam Penetapan Kebijakan	68
2. Peran UIN Sunan Kalijaga dalam Penetapan Kebijakan	70
3. Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga Periode 2016-2020	80
B. Analisis Kebijakan UIN Sunan Kalijaga Perspektif Maqashid Syari'ah.....	87
1. Kebijakan PBAK Perspektif Maqashid Syari'ah.....	87
2. Kebijakan Cadar Perspektif Maqashid	

Syari'ah.....	103
3. Kebijakan Wajib Pondok Pesantren Bagi Mahasiswa Baru Perspektif Maqashid Syari'ah.....	121
BAB IV PENUTUP	148
A. KESIMPULAN.....	148
B. SARAN	153
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN-LAMPIRAN	165



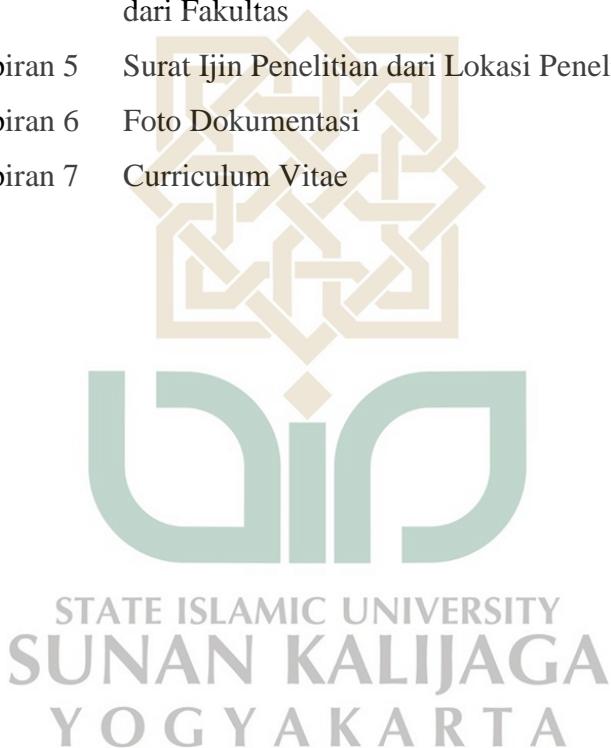
DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Hasil Penelitian Terdahulu (Kajian Pustaka/
Literature Review), 24.
- Tabel 2.** Prosedur Penelitian, 48.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pengajuan Judul Tesis Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam
- Lampiran 2 Pengajuan Dosen Pembimbing Tesis
- Lampiran 3 Kesediaan Pembimbing Tesis
- Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian
dari Fakultas
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari Lokasi Penelitian
- Lampiran 6 Foto Dokumentasi
- Lampiran 7 Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki latar belakang geografis, suku, sosial, kultur, dan adat istiadat yang berbeda-beda sehingga memerlukan pengelolaan sistem dan layanan pendidikan yang diterima sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pendidikan bermutu di kalangan masyarakat multikultural ini, maka tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional harus melibatkan berbagai kalangan, tidak cukup dikelola oleh pemerintah saja, melainkan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, keluarga dan masyarakat. Ini menunjukkan eksistensi keberadaan desentralisasi pendidikan di Indonesia dalam menanggapi aspirasi, harapan dan keinginan segala pihak termasuk desentralisasi kebijakan pendidikan di pendidikan tinggi.²

Desentralisasi mengandung makna proses pendeklasian kekuasaan atau wewenang dari pimpinan ke tingkat bawah dalam sebuah organisasi. Desentralisasi pendidikan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang

² Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 129-130.

kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan dibuat demi mencapai tujuan pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kebijakan pendidikan dapat berfungsi mengadopsi gejala perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku masyarakat yang cenderung mengarah ke suasana kehidupan yang lebih bebas, terbuka dan demokratis.³

Kebijakan adalah prinsip yang diambil dan dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Sebagai seorang pakar ilmu politik Richard Rose menyatakan bahwa kebijakan seharusnya dimengerti sebagai serangkaian aktivitas yang kurang lebih berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang terlibat dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Berkenaan dengan pengertian kebijakan, Budi Winarno menyatakan bahwa dalam mengartikan kebijakan, seseorang haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan dari pada apa yang diajukan mengenai suatu problem. Alasannya adalah kebijakan merupakan suatu proses yang juga mencakup tahap penerapan dan

³ *Ibid.*, hlm. 139-141.

evaluasi sehingga pengertian kebijakan lebih menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.⁴

Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi memiliki arti yang berbeda. Dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan pasca pendidikan menengah yang meliputi program pendidikan diploma (D3), sarjana (S1), magister (S2), spesialis dan doktor (Dr) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah berupa jenjang yang lebih tinggi dari pada menengah. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dikenal dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang kelembagaannya dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Perguruan tinggi memiliki tiga tanggung jawab yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengembangan pengabdian masyarakat. Ketiga tanggung jawab tersebut yang membedakan antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan

⁴ *Ibid.*, hlm. 123-134.

menengah.⁵ Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yaitu sekitar tahun 1900-an. Tujuan didirikannya lembaga pendidikan tinggi oleh Belanda tidak lebih dari politik etis ketimbang tujuan mulia untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia.⁶ Tujuan lainnya adalah menyediakan profesional dan tenaga ahli, terutama dalam bidang teknik, untuk melancarkan penjajahan.⁷

Seseorang yang mempunyai kelebihan dalam memimpin atau mempengaruhi seseorang disebut dengan pemimpin atau pimpinan. Dalam lingkup pengelolaan, seorang pemimpin adalah seorang yang terlibat aktif melakukan perencanaan, koordinasi (pengorganisasian), pelaksanaan, dan mengevaluasi serta mengarahkan tindakan anggotanya untuk meraih tujuan organisasi.⁸ Dalam konteks pengelolaan pendidikan terutama pendidikan tinggi islam seperti UIN dan IAIN seorang pemimpinnya disebut Rektor serta STAIN disebut Ketua. Keberadaan Rektor/Ketua sangat berfungsi dan berperan dalam mengorganisasi seluruh elemen manajemen dan lini kerja lembaga

⁵ Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 89.

⁶ Galih R. N. Putra, *Politik Pendidikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 61.

⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

⁸ Mahmud, *Manajemen Pendidikan Tinggi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 131.

pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Rektor dan jajarannya bertanggung jawab sepenuhnya untuk setiap keberhasilan dan kegagalan yang dialami lembaga pendidikan dalam implementasi setiap rinci perencanaan kerja dan kebijakan yang telah diputuskan dan ditetapkan. Tujuan utama dari kepemimpinan pendidikan adalah memberikan motivasi, arahan/bimbingan, dan berbagai bentuk peran dari kepemimpinan lainnya, agar setiap perilaku yang dilakukan dalam usaha peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan bisa berjalan dengan baik.⁹ Pengelolaan atau manajemen merupakan urusan suatu rangkaian kebijakan, bimbingan untuk aktivitas, atau petunjuk program kerja ditetapkan, serta administrasi merupakan perbuatan pelaksanaan dalam suatu kerja kolaboratif untuk berbagai kebijakan.¹⁰

Perguruan tinggi sebagai organisasi memerlukan pemimpin, kepemimpinan dan manajemen. Pada dasarnya pemimpin, kepemimpinan dan manajemen yang dibutuhkan perguruan tinggi tidak jauh berbeda pada umumnya. Pemimpin, kepemimpinan dan manajemen perguruan tinggi bertanggung jawab pada tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian,

⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

dan pengabdian masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, seorang pemimpin harus memiliki skill dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang akan membantunya dalam menjalankan kegiatan perguruan tinggi.¹¹

Dalam pendidikan tinggi telah banyak mencetak pemikir, tokoh dan orang-orang yang besar yang beriman, bertakwa serta memiliki ilmu dan akhlak yang mulia. Kebijakan-kebijakan dalam pendidikan tinggi yang dibuat oleh *stakeholder* bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dalam Islam kemaslahatan seorang mulai dari kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan kehormatan dan keturunan, kemaslahatan akal dan kemaslahatan harta sangat diperhatikan. Kemaslahatan ini disebut dengan Maqashid Syari'ah. Maqashid Syari'ah adalah tujuan yang menjadi target/fokus teks dan hukum-hukum partikular untuk diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan manusia. Baik hukum-hukum berupa perintah, larangan, maupun mubah, berlaku untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.¹²

Syariat berasal dari kata “syara'a as-syai” yang berarti menjelaskan sesuatu, atau “asy-syi'ah” dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 112-113.

¹² Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Penj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 17.

“asy-syari’ah” yang berarti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia tentang urusan agama atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah, baik berupa ibadah (puasa, sholat, haji, zakat dan seluruh amal kebaikan), maupun muamalah yang mengatur segala peraturan kehidupan manusia seperti (jual-beli, nikah dan lain-lain).¹³ Jika tujuan Maqashid Syari’ah Islam adalah mementingkan maslahat dan menghindari bahkan menghilangkan mafsadat,¹⁴ maka dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kehidupan dewasa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijauhi, dan memang tidak butuh untuk dijauhi. Permasalahannya bagaimana memberdayakan umat Islam agar ikut andil menghiasi budaya modern. Untuk itu peran dan fungsi pendidikan tinggi Islam perlu dilihat dalam menyediakan ilmu pengetahuan kepada umat manusia khususnya warga Indonesia untuk eksis di ajang globalisasi. Usaha-usaha yang perlu dilaksanakan *stakeholder* pendidikan tinggi dan masyarakat Islam diantaranya membuang kerangka berfikir dan pandangan dikotomis mengenai ilmu

¹³ *Ibid.*, hlm. 12-13.

¹⁴ Yudian Wahyudi, *Usul Fikih Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 38.

pengetahuan agama dan kehidupan. Pendidikan tinggi Islam seharusnya mampu menjadikan umat Islam bahwa kemajuan yang diraih umat manusia sekarang ini adalah milik bersama umat manusia, dimana umat Islam ikut andil memiliki sumbangsih di dalamnya. Menunjukkan keberagaman yang lebih damai, sejuk dan ramah, berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai *rahmatan lil alamin* yang diajarkan Islam dan pengetahuan Tuhan inklusif yang diperankan oleh Nabi Muhammad. Serta menumbuhkembangkan ukhuwah Islamiyah yang lebih umum (universal) dan meliputi berbagai segi kehidupan umat Islam.¹⁵

Tujuan studi di pendidikan tinggi Islam yaitu untuk mencapai lulusan Muslim universitas yang bertakwa, berprestasi, berakhhlak mulia serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Pendidikan tinggi ialah institusi sosial yang tidak hanya di huni oleh sosok pendidik tetapi juga mewujudkan tradisi keguruan. Pendidikan tinggi sebuah bidang disiplin sosial yang erat dengan semangat bagi kehadiran sosok-sosok yang harus di gugu lan ditiru.¹⁷

¹⁵ Yakub Matondang, Syahrin Harahap, dan Imron Rosyidi, *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. xii-xiii.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁷ Baharuddin dkk, *Reorientasi Tradisi Perguruan Tinggi Islam Menuju World Class University*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 58.

Kebijakan pendidikan merupakan hasil keputusan yang diambil bersama antara pemerintah pusat/daerah dan yang berperan di luar pemerintah serta memperhatikan hal-hal yang memengaruhinya untuk diaplikasikan atau tidak pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.¹⁸

Dalam pendidikan tinggi Islam, kepemimpinan yang dipegang oleh Rektor, Ia memiliki wewenang dalam mengelola dan membuat keputusan keputusan serta mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang disahkan oleh Rektor tentunya melihat segala resiko atau dampak dari sebuah keputusan. Terkait pengambilan keputusan, kebijakan Rektor melihat kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Maqashid syari'ah sebenarnya merupakan metode yang dapat mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai peristiwa/permasalahan. Pengembangan teori ini secara runcing dan bertanggungjawab merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.¹⁹

Ulama maqashidiyyun sepakat akan adanya maksud, hikmah dan tujuan di balik penetapan syari'ah. Meskipun mereka berbeda dalam mengartikan makna

¹⁸ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 59.

¹⁹ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2015), hlm. 73-74.

maqashid syari'ah, semuanya menuju satu muara yakni terciptanya kebaikan/manfaat (kemaslahatan) dan hilangnya kerusakan/kebinasaan (kemafsadatan).²⁰ Dalam Al-Asybah As Suyuthy, disebutkan bahwa ada kaidah berasal dari fatwa Imam Asy Syafii:

تَصْرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ

Latin/Artinya: Tasharrofu al-imamu ala ar-raiyati manuuthun bil maslahah/Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

Kaidah ini memberi pemahaman, bahwa setiap tindakan/kebijaksanaan pemimpin (pemerintah/Rektor) yang berkenaan hak-hak mahasiswa harus dikaitkan dengan kemaslahatan mahasiswa secara umum dan tujuannya untuk mendapatkan suatu kebaikan.²¹ Jadi, adanya relavansi pemimpin dalam menetapkan keputusan sebuah kebijakan dan telah memikirkan dampak yang terjadi dari kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan bersama tanpa adanya diskriminasi sebagian golongan. Oleh karena itu, peneliti hendak membahas tentang kebijakan pimpinan di sebuah lembaga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tersebut ialah Universitas

²⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LkiS Group, 2010), hlm. 208.

²¹ Asjimuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 61.

Islam Negeri Sunan Kalijaga menjadi lokasi penelitian ini.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti membaca artikel mengenai beberapa kebijakan UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020 baik yang telah ditetapkan maupun yang dicabut kembali. Kemudian peneliti juga mewawancarai salah satu dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu Zainal Arifin. Bahwasanya beliau memberikan saran dan rekomendasi bahwasanya stakeholder/pemimpin UIN Sunan Kalijaga memahami terkait kebijakan pimpinan perspektif maqashid syari'ah.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti mengobservasi dan membaca artikel mengenai beberapa kebijakan UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020 baik yang telah ditetapkan maupun yang dicabut kembali. Kemudian peneliti juga mewawancarai salah satu dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu Zainal Arifin. Bahwasanya beliau memberikan saran dan rekomendasi bahwasanya stakeholder/pemimpin UIN Sunan Kalijaga memahami terkait maqashid syari'ah.

Penetapan kebijakan-kebijakan di perguruan tinggi, Rektor dan jajarannya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pasti telah memikirkan

kemaslahatan-kemaslahatan atas diberlakukannya kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dibuat, diputuskan, dan ditetapkan oleh Rektor dan jajarannya pastinya ada alasan-alasan tersendiri. Jika dikaitkan dengan maqashid syari'ah, pastinya mereka telah memikirkan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika kebijakan yang telah ditetapkan terjadi perbedaan pendapat dengan kalangan masyarakat, pemimpin juga bisa mengelola konflik yang terjadi sehingga menjadikan keadaan membaik dan kondusif kembali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran, sumber dan alur pembuatan dan penetapan kebijakan di UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020?
2. Bagaimana kebijakan kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020 dianalisis perspektif maqashid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diambil kesimpulan tujuan penelitian ini adalah (a) mengetahui, memahami peran, sumber dan alur dalam pembuatan kebijakan di pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta perspektif maqashid syari'ah periode 2016-2020. (b) menjabarkan

secara mendalam dan menganalisis beberapa kebijakan UIN Sunan Kalijaga perspektif Maqashid Syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan pertama, secara teoritis manfaatnya yakni (a) memberikan sumbangsih keilmuan dan dapat diimplementasikan dibidang manajemen pendidikan tinggi terkait kebijakan dalam dunia pendidikan Islam. (b) Sebagai bahan referensi dan menutupi kelemahan dan kekurangan penelitian sebelumnya. Kedua, secara praktis manfaatnya yaitu (a) bagi institusi (UIN Sunan Kalijaga), memberikan solusi untuk selalu berbenah dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. (b) bagi khalayak umum, memberikan pemahaman dalam menanggapi peraturan dan kebijakan pendidikan dengan bijaksana.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka tidak hanya mencantumkan hasil penelitian terdahulu, tetapi disertai dengan analisis yang komprehensif agar benar-benar untuk menghindari kesamaan penelitian atau kesamaan pembahasan terhadap karya orang lain. Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka, disini dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji kebijakan di pendidikan tinggi. Berbicara mengenai kebijakan tidak

terlepas peran pemimpin dan kepemimpinan Rektor dalam mengelola pendidikan tinggi.

Rini Setyaningsih dalam tesisnya mengkaji latar belakang, metode, proses penciptaan kultur religius dan evaluasi perumusan kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam LPSI di UAD kampus 3. Hasil penelitiannya ialah (1) Latar belakang teologi *al-amr bil-ma'ruf wa an-nahi 'an al-munkar*; objektif sosiologis yang mendorong syiar dakwah keislaman; dan tanggung jawab struktural sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah. (2) Metode internalisasi dari akademik adanya mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), dari non akademik LPSI bekerjasama dengan organisasi mahasiswa dalam pelaksanaan kajian, pelatihan dan lomba yang bertema Islami. (3) Proses penciptaan kultur religius yaitu menempuh mata kuliah AIK, kewajiban tes baca Al-Qur'an, dan kewajiban berbusana syar'i. (4) Hasil evaluasi (a) dalam formulasi kebijakan, pihak LPSI menggunakan pendekatan rasional dan strategis. (b) dalam implementasi kebijakan, pihak LPSI meminta legitimasi kepada Rektor UAD untuk mendapatkan pengesahan. (c) dalam kinerja kebijakan, pihak LPSI bekerjasama dengan seluruh dosen AIK dan sertifikasi serta pembimbing kegiatan tahsinul Qur'an (d) dalam

lingkungan kebijakan, pihak LPSI bekerjasama dengan Bagian Fasilitas pengadaan sarana dan prasarana.²²

Ainun Nida Rifqi dan Ika Febrian Kristiana mengungkapkan dalam penelitiannya gambaran kepemimpinan Rektor Universitas Negeri Makassar merasa bahwa jabatan yang diamanahkan kepada dia saat ini merupakan campur tangan Tuhan dan adanya kemauan pada diri subjek. Gaya kepemimpinan demokratis yang digunakan Rektor cukup efektif diterapkan di Universitas Negeri Makassar.²³

Riset yang dilakukan oleh Agung Kuswantoro, Ismiyati, dan Hana Netty Purasari mengenai tipe kepemimpinan bertumbuh dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus di Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini ialah Pohon yaitu (1) Menumbuhkan bibit kepemimpinan, (2) Memperkuat pohon kepemimpinan, (3) Merangkai jejaring pohon kepemimpinan, (4) Pohon kuat menghadapi badai, (5) Menyemai tunas kepemimpinan baru, dan (6) Karakternya adalah

²² Rini Setyaningsih, "Kebijakan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Pembentukan Kultur Mahasiswa (Studi Terhadap Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta)", (Tesis: Yogyakarta. Program Studi Magister Pendidikan Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. IX.

²³ Ainun Nida Rifqi dan Ika Febrian Kristiana, "Kepemimpinan Dalam Setting Instansi Pendidikan Tinggi (Sebuah Studi Kasus pada Pemimpin/ Rektor Universitas Negeri Makassar)", *Jurnal Empati*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 11.

karakter yang baik seperti pohon yang tumbuh menjulang tinggi. Kepemimpinan bertumbuh itu seperti Pohon karena (1) Pohon dapat membuat jaringan pertemanan melalui akar-akar yang saling terkait, (2) Pohon dapat menciptakan jaring pengaman sosial bagi sesama pohon, (3) Pohon memiliki etiket, (4) Pohon memiliki kemampuan belajar atau bersekolah, (5) Secara kolektif, pohon dapat mempengaruhi iklim suatu daerah, (6) Dari pertumbuhan dan perilakunya, pohon memiliki cara mencerna waktu yang hebat.²⁴

Akhmad Soleh telah melakukan penelitian yang mengkaji kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, lebih spesifik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti; Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN-SUKA). Dalam penelitian ini Akhmad Soleh menguraikan respon dan tanggapan lembaga pendidikan tinggi dalam penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas yaitu sekolah luar biasa, pendidikan integrasi (penggabungan), dan pendidikan

²⁴ Agung Kuswantoro, Ismiyati, dan Hana Netty Purasari, "Kepemimpinan Bertumbuh (Studi Kasus Kepemimpinan Rektor UNNES)", *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 36.

inklusi.²⁵ Hal-hal terkait akses penyandang disabilitas di pendidikan tinggi perlu dijadikan fokus mulai dari pemerintah sampai dengan anggota masyarakat. Maksud hal-hal terkait akses adalah kemudahan yang diberikan/difasilitasi oleh pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas untuk memberikan kesamaan dan kesetaraan dalam segala sudut pandang kehidupan dan penghidupan.²⁶

Bagi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi diperlukan peraturan yang tidak menyulitkan, memiliki maksud untuk mengantisipasi dan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut dapat dirumuskan oleh pimpinan pendidikan tinggi dan para staf universitas.²⁷ Hasil penelitian ini adalah pendidikan tinggi diatas seperti ISI, UGM dan UNY untuk kebijakan dan fasilitas terhadap penyandang disabilitas masih belum mendapatkan kesempatan penuh kemudahan dan peluang dalam mengakses pendidikan tinggi secara maksimal. Sedangkan di UIN Sunan Kalijaga telah memiliki sistem inklusi yang

²⁵ Akhmad Soleh, “ Kebijakan Peguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, Nomor 1, 2014. hlm. 9.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

mampu memberi layanan mahasiswa penyandang disabilitas.²⁸

Siti Nurkhoti'ah mengungkapkan ujian merupakan salah satu bagian akhir rangkaian dari proses belajar mengajar yang dilalui oleh mahasiswa dalam kurun waktu satu semester. Setiap rangkaian proses belajar mengajar termasuk Ujian Akhir Semester (UAS) telah ditetapkan peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya. Tata tertib ujian ini berlaku bagi dosen/staf sebagai pengawas dan mahasiswa sebagai peserta ujian. Karena kerap kali terjadi pelanggaran tata tertib seperti menyontek, membawa jawaban dari rumah dan kesalahan dalam mengisi identitas mahasiswa seperti NIM, kode mata kuliah dan lain sebagainya, sehingga Rektor memberlakukan kebijakan tata tertib ujian di Universitas Terbuka yang berisikan menegaskan sangsi-sangsi atau hukuman akademik yang harus diterima bagi pelanggar.²⁹ Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa sepakat dengan diberlakukannya tata tertib yang mengatur proses berjalannya Ujian Akhir Semester (UAS). Meskipun telah ditetapkan tata tertib yang mengatur pelanggaran

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1-2.

²⁹ Siti Nurkhoti'ah, *Efektivitas Pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Nomor 3901/H.31/Kep/2008 Tahun 2008 tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian di UPBJJ-UT Surakarta*, (Universitas Terbuka Surakarta: Laporan Penelitian Madya, 2010), hlm. 9-10.

yang dilakukan mahasiswa tidak dapat terelakkan atau tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak mahasiswa yang melanggar. Sehingga Siti Nurkhot'i ah memberikan kritikan dan saran kepada pihak institusi agar memberikan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat di Universitas Terbuka Surakarta.³⁰

Elsa Maharrani, Isniati, dan Adila Kasni Astienia melakukan penelitian yang mengkaji kebijakan pihak Universitas dalam pelarangan merokok di lingkungan kampus. Kebijakan ini sikap Universitas dalam preventif perokok pasif dari asap perokok aktif. Lingkungan yang dijadikan larangan untuk merokok yaitu ruang kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama, dan bus kampus. Pelarangan merokok di lingkungan kampus ini berlaku untuk seluruh warga atau seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Namun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pelarangan merokok di lingkungan universitas belum mendapat hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan dan kejelasan tanggungjawab untuk mengatur kebijakan ini. Alasan lain yaitu masih banyak ditemukan mahasiswa, dosen dan staff merokok ditempat yang menjadi larangan, hal ini terbukti pada ruangan Pusat Kreatifitas Mahasiswa ditemukan puntung rokok. Penyebab lain tidak berjalannya

³⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

kebijakan ini secara signifikan dikarenakan kebijakan ini bersifat himbauan sehingga tidak ada hukuman/sanksi yang mengikat pelakunya.³¹

Ricky Perianto meneliti tentang kebijakan surat Keputusan Rektor Universitas Riau nomor 2715/UN/19/TU/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang diterapkan Universitas Riau dipimpin oleh Rektor, tanggungjawab pelaksanaan UKT ini dibebankan kepada pembantu Rektor II, yang kemudian dikelola oleh Badan kerja sama dan pengembangan Universitas Riau. Penerapan kebijakan ini bertujuan mulia yaitu meringankan beban biaya kuliah dan menghindari adanya pungutan liar. Akan tetapi kebijakan ini belum terlaksana secara optimal karena sosialisasi yang masih terbatas dan tidak adanya Standar Operasional Procedure (SOP) yang diberikan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.³² Kebijakan UKT ini memberikan manfaat terjaganya mahasiswa baru terhadap pembayaran-pembayaran/pungutan liar yang dilakukan pihak Uiniversitas.

³¹ Elsa Maharrani, Isniati, dan Adila Kasni Astiena, “Studi Implementasi Kebijakan Larangan Merokok di Universitas Andalas Tahun 2012”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9, Nomor 1, 2015. hlm. 5.

³² Ricky Perianto yang berjudul “Pemetaan Stakeholders dalam Penetapan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Riau Tahun 2013”, *JOM FISIP*, Vol. 3, Nomor 1, 2016. hlm. 7.

Amirul Ulum dan Eko Setiawan menyatakan dengan ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Surabaya No. 383 Tahun 2012 tentang wajib serah simpan “Karya Ilmiah” membuat perpustakaan Universitas Surabaya sebagai unit penunjang akademik yang memperoleh tanggung jawab untuk memelihara, menjaga mempertahankan, mengurus dan mendayagunakan semua karya ilmiah.³³ Kemajuan *institutional repository* di dunia modern telah menjadi perhatian penting bagi pendidikan tinggi yang telah banyak menghasilkan/mengeluarkan karya penelitian dan karya ilmiah. Pengaruh ini berdampak secara konkret terhadap upaya untuk melindungi, memelihara, menjaga, dan merawat karya-karya tersebut agar dapat disimpan, dibagikan dan digunakan oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat secara umum. Jadi peran dan fungsi perpustakaan yang otoritas untuk mengelola karya ilmiah sivitas akademika Universitas Surabaya dapat diantisipasi dengan baik melalui *institutional repository*. Akan tetapi masih perlu dilakukan upaya lebih aktif bagi perpustakaan dalam melaksanakan sosialisasi peraturan tentang wajib serah simpan karya ilmiah, dan perkenalan secara sungguh-sungguh dengan

³³ Amirul Ulum dan Eko Setiawan yang berjudul, “Analisis Konten Dan Kebijakan Akses Institutional Repository”, *Jurnal Pustakaloka*, Vol. 8, Nomor 1, 2016, hlm. 147.

menyampaikan berbagai manfaat dan keuntungan dalam pemanfaatan *institutional repository*.³⁴

Dari tinjauan pustaka diatas, penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kekhasan tersendiri yaitu kebijakan kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga dalam mengatur, mengelola kebijakan pendidikan tinggi demi menjaga kemaslahatan di lingkungan Universitas. Adapun yang menjadi kajian peneliti yaitu (1) Peran stokeholder dan alur pembuatan dan penetapan kebijakan. (2) Kepemimpinan Rektor UIN Sunan Kalijaga pada masa 2016-2020. (3) Kebijakan-kebijakan UIN Sunan Kalijaga dianalisis dengan perspektif maqashid syari'ah. Macam-macam kebijakan pada masa 2016-2020 diantaranya adalah kebijakan mengenai Perkenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) yang mana kebijakan ini dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, kebijakan yang melarang pemakain cadar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam proses belajar mengajar, dan kebijakan Program Mahasiswa Baru (MABA) untuk tinggal dan menuntut ilmu minimal satu tahun di Pondok Pesantren yang ada di Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti memberikan judul penelitian ini adalah “Kebijakan Kepemimpinan UIN

³⁴ *Ibid.*, hlm. 146.

Sunan Kalijaga Periode 2016-2020 dalam Pengelolaan
Pendidikan Tinggi Perspektif Maqashid Syari'ah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

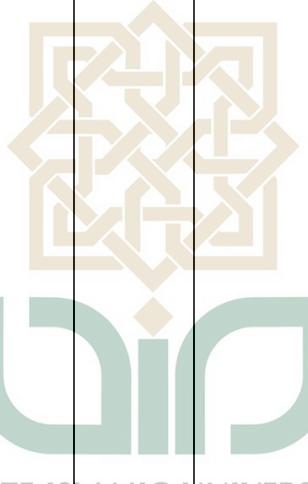
Tabel 1

HASIL PENELITIAN TERDAHULU (KAJIAN PUSTAKA/LITERATURE REVIEW)

No	Nama	Judul	Masalah	Pendekatan	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rini Setya ning sih. (2017)	Kebijakan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Pembentukan Kultur Mahasiswa (Studi Terhadap Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) di Universitas Ahmad Dahlan (UAD),	Permasalahan ny ialah (1) Bagaimana latar belakang perumusan kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam LPSI di UAD kampus 3. 3. STASIUN ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2) Bagaimana metode internalisasi nilai-nilai Islam dalam	Field Work Research	Kualitatif	(1) Latar belakang teologi <i>al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar</i> ; objektif sosiologis yang mendorong syiar dakwah keislaman; dan tanggung jawab struktural sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah. (2) Metode internalisasi dari akademik adanya mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), dari non akademik LPSI bekerjasama dengan organisasi mahasiswa dalam pelaksanaan kajian, pelatihan dan lomba yang bertema Islami. (3) Proses penciptaan kultur religius yaitu menempuh mata kuliah AIK,

		<p>Yogyakarta)</p> <p>pembentukan kultur religius mahasiswa di UAD kampus 3. (3)</p> <p>Bagaimana proses penciptaan kultur religius mahasiswa di UAD kampus 3. 4)</p> <p>Bagaimana evaluasi kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam LPSI dalam pembentukan kultur religius mahasiswa di</p>			<p>kewajiban tes baca Al-Qur'an, dan kewajiban berbusana syar'i. (4)</p> <p>Hasil evaluasi (a) dalam formulasi kebijakan, pihak LPSI menggunakan pendekatan rasional dan strategis.(b) dalam implementasi kebijakan, pihak LPSI meminta legitimasi kepada Rektor UAD untuk mendapatkan pengesahan. (c) dalam kinerja kebijakan, pihak LPSI bekerjasama dengan seluruh dosen AIK dan sertifikasi serta pembimbing kegiatan tahsinul Qur'an (d) dalam lingkungan kebijakan, pihak LPSI bekerjasama dengan Bagian Fasilitas</p>
--	--	---	--	--	--

			UAD kampus 3.			
2.	Ainun Nida Rifqi, Ika Febrian Kristiana (2017)	Kepemimpinan dalam Setting Instansi Pendidikan Tinggi (Sebuah Studi Kasus pada Pemimpin/ Rektor Universitas Negeri Makassar)	Bagaimana gambaran kepemimpinan seorang rektor Universitas Negeri Makassar	Studi Kasus	Kualitatif	Rektor Universitas Negeri Makassar merasa bahwa jabatan yang diamanahkan kepada dia saat ini merupakan campur tangan Tuhan dan adanya kemauan pada diri subjek dan Gaya kepemimpinan demokratis yang digunakan subjek cukup efektif diterapkan di Universitas Negeri Makassar.
3.	Agung Kuswantoro, Ismiyatati,	Kepemimpinan Bertumbuh (Studi Kasus Kepemimpinan Rektor UNNES)	Bagaimana arti kepemimpinan bertumbuh.	Studi Kasus	Kualitatif	Pohon yaitu (1) Menumbuhkan bibit kepemimpinan, (2) Memperkuat pohon kepemimpinan, (3) Merangkai jejaring pohon kepemimpinan, (4) Pohon kuat menghadapi badi, (5) Menyemai tunas kepemimpinan baru, dan (6)

	dan Hana Netty Puras ari (2019)				Karakternya adalah karakter yang baik seperti pohon yang tumbuh menjulang tinggi. Kepemimpinan bertumbuh itu seperti Pohon karena (1) Pohon dapat membuat jaringan pertemanan melalui akar-akar yang saling terkait, (2) Pohon dapat menciptakan jaring pengaman sosial bagi sesama pohon, (3) Pohon memiliki etiket, (4) Pohon memiliki kemampuan belajar atau bersekolah, (5) Secara kolektif, pohon dapat mempengaruhi iklim suatu daerah, (6) Dari pertumbuhan dan perilakunya, pohon memiliki cara mencerna waktu yang hebat.
--	--	--	--	--	--

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

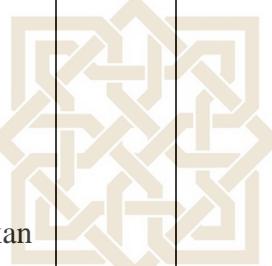
4.	Akhmad Soleh (2014)	Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas	Masalah teoritis utama dalam penelitian ini adalah mengenai masyarakat penyandang disabilitas masih sedikit yang mendapatkan kesempatan dan persamaan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan diperlukan peraturan/kebijakan yang	Fenomenolog i dan kebijakan pendidikan	Kualitatif	Akhmad Soleh mengungkapkan pendidikan tinggi seperti ISI, UGM dan UNY untuk kebijakan dan akses terhadap penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa) belum mendapatkan kesempatan penuh kemudahan dan peluang dalam mengakses pendidikan tinggi secara maksimal yang hanya memiliki integrasi. Sedangkan di UIN Sunan Kalijaga telah memiliki sistem inklusi yang mampu memberi layanan/ menyesuaikan (akomodatif) bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
----	---------------------	--	--	--	------------	--

			tidak menyulitkan serta menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi sekolah luar biasa, pendidikan integrasi (penggabungan), dan pendidikan inklusi.				
5.	Siti Nurk hoti'ah (2010)	Efektivitas Pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Nomor 3901/H.31/Ke	Problem dalam penelitian Siti Nurkhoti'ah adalah (1) bentuk upaya perguruan	Studi kasus	Mixed (wawan cara 20 orang dan angket	Adapun hasil penelitiannya (1) Bentuk peningkatan kualitas UAS di UPBJJ-UT Surakarta diberlakukan Kebijakan Rektor dalam penangangan bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib UAS yaitu	

		p/2008 Tahun 2008 tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian di UPBJJ-UT Surakarta	tinggi meningkatkan kualitas terhadap pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) mahasiswa. (2) Pandangan mahasiswa terhadap kebijakan perguruan tinggi terkait peningkatan kualitas UAS.		kuesion er 1400 orang) kemudi an diolah dengan teknik analisis deskript if	hukumannya nilai “E”, nilai tidak diproses dan mengulang semester depan. (2) Pandangan mahasiswa terkait kebijakan tersebut mendapat respon yang baik dan setuju diberlakukannya kebijakan itu namun pelanggaran yang terjadi ketika ujian tidak dapat dihindari dan tetap terjadi seperti kesalahan menulis NIM, kode mata kuliah, dan tanggal lahir.
6.	Elsa Maha rrani, Isniat i, dan	Studi Implementasi Kebijakan Larangan Merokok di	Permasalahan dalam riset ini adalah bahayanya rokok yang	Studi kasus	Kualitat if	Hasil penelitian ini adalah tempat-tempat yang menjadi larangan untuk merokok adalah ruang kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama, bus kampus dan secara

	Adila Kasni Astie na (2012)	Universitas Andalas Tahun 2012	mengancam nyawa seseorang baik perokok aktif maupun pasif sehingga Universitas membuat kebijakan larangan merokok lingkungan kampus. Kemudian bagaimana implementasi kebijakan tersebut.	di		umum lingkungan Universitas. Implementasi kebijakan larangan merokok belum terlaksana secara maksimal karena masih ditemukannya bekas puntung rokok di Pusat Kreatifitas Mahasiswa (PKM) dan kebijakan tersebut masih bersifat himbauan karena tidak adanya sanksi yang mengikat bagi yang melanggar. Selain itu juga tidak adanya pengawasan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut sehingga kebijakan itu hanya sebatas pelarangan saja.
7.	Ricky Peria nto (2016)	Pemetaan Stakeholders dalam Penetapan	Ricky perianto membatasi permasalahan UKT terkait	✓	Kualitat if	1. Kebijakan UKT di Universitas Riau dibagi menjadi 5 kelompok, sesuai dengan surat edaran Direktorat pendidikan tinggi nomor

)	Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Riau Tahun 2013	dengan sejauh mana pemahaman pihak birokrat kampus terhadap pemetaan kebijakan UKT.			272/E1.1/KU/2013 tentang aturan perguruan tinggi dalam menetapkan biaya Uang Kuliah Tunggal supaya sesuai dengan amanat undang-undang. aturan itu ialah; (1) tarif UKT sebaiknya dibagi 5 kelompok, (2) kelompok 1 Rp 0,-s.d Rp 500.000, (3) minimal ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar kelompok 1, (4) kelompok 3-5 membayar UKT sesuai dengan kemampuan ekonominya, (5) minimal ada 5% dari total mahasiswa masuk dalam kategori kelompok 2 Rp 500.000, - s.d Rp. 1000.000. 2. Kurangnya transparansi Universitas Riau dalam pembagian kelompok UKT.
8.	Amir ul Ulum	Analisis Konten dan Kebijakan	Permasalahananya dalam penelitian ini	Analisis konten	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah (1) Perkembangan <i>institutional repository</i> Universitas Surabaya

	dan Eko Setia wan (2016)	Akses Institutional Repository	ialah Universitas Surabaya tertantang dalam menghadapi kemajuan teknologi sehingga memanfaatkan <i>institutional repository</i> untuk pengelolaan dan penyebaran sumber informasi digital. Dan untuk mengetahui kelebihan dan kebijakan			<p>sejak tahun 2011 telah memberikan dampak peranan dan kontribusi dalam mendukung gerakan <i>open access</i> dari perantara penyediaan konten karya ilmiah yang dapat diakses secara <i>fulltext</i>. <i>institutional repository</i> yang memanfaatkan sistem interoperabilitas dengan melakukan interkoneksi dengan portal Garuda dan <i>Onesearch</i> akan meningkatkan visibilitas melalui akses yang terpadu di tingkat nasional.</p> <p>(2) Kekurangan <i>institutional repository</i> penyediaan jenis konten yang masih terbatas.</p>
--	---------------------------	--------------------------------	---	--	--	--

			kekurangan <i>institutional</i> <i>repository</i>				
--	--	--	---	--	--	--	--



F. Kerangka Teoritis

1. Konsep Pemimpin dan Kepemimpinan

Setiap insan pada hakikatnya adalah seorang pemimpin dan setiap makhluk yang berakal akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya selama di dunia. Manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin di dunia, setidaknya mampu memimpin dirinya sendiri. Ketika dalam organisasi, harus ada pimpinannya, secara struktural diikuti dan disegani orang-orang yang berada disebuah organisasi. Organisasi yang tidak ada pemimpin akan mengalami kesulitan dalam mengelola organisasi. Oleh karena itu, adanya seorang pemimpin yang memimpin, memerintahkan, membimbing dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan individu, kelompok dan organisasi.³⁵ Dalam jurnal Linda Ika Mayasari bahwa Fiedler mengungkapkan Kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan.³⁶

³⁵ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 304.

³⁶ Linda Ika Mayasari, "Leadership dan Birokrasi Perguruan Tinggi", dalam HIKMAH Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, Nomor 1, 2017, hlm. 104.

Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kecakapan untuk memengaruhi perilaku dan tindakan orang lain dalam kinerjanya dengan memanfaatkan kekuasaan. Kekuasaan adalah kecakapan untuk membimbing, memberikan petunjuk dan memengaruhi orang lain yang berhubungan dengan berbagai tugas yang harus dilaksanakan.³⁷ Keberhasilan seorang pemimpin dalam manajemen, mengelola dan mencapai tujuan organisasi bukan hanya karena ia mempunyai kecakapan dalam mengatasi beraneka ragam problem, akan tetapi juga karena ia mampu memahami bagaimana cara memusatkan, menjadikan satu dan memanfaatkan anggota organisasi yang berkompeten disekitarnya. Ia mampu mengerahkan anggota organisasi disekitarnya untuk bekerja dengan penuh pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan serta mewujudkan tujuan organisasi dan seorang pemimpin juga ikut bekerja.³⁸

Teori Great Man dijelaskan oleh Bennis dan Nanus bahwa pemimpin dan kepemimpinan memiliki makna tersendiri. Teori Great Man beranggapan pemimpin dilahirkan bukan diciptakan.

³⁷ Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 300.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 317.

Artinya bahwa kekuasaan berpusat pada segelintir orang tertentu melalui proses pewarisan, memiliki kecakapan memimpin atau karena nasib memiliki potensi untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin.³⁹ Teori *Environtment* (lingkungan) yang dikembangkan oleh V.H Vroom dan Philip Yellow dengan berpedoman pada pendekatan situasional dan kondisional. Kepemimpinan yang dimiliki pemimpin akan berhasil apabila pemimpin mampu bersikap fleksibel untuk mengubah gayanya agar sesuai dengan situasi. Artinya pemimpin menduduki jabatan sebagai pemimpin bisa diraih atau bisa didapatkan meskipun tidak memiliki keturunan dari pemimpin seperti teori great men.⁴⁰

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan organisasi yang dikelola mengarah kepada penetapan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan ialah tenaga atau daya penggerak semua sumber-sumber, plat yang sudah ada bagi suatu organisasi. Kepemimpinan adalah satu kualitas kegiatan-kegiatan kerja dan interaksi di dalam kondisi organisasi. Kepemimpinan yakni bantuan dan sokongan dari seseorang di dalam situasi-situasi

³⁹ Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 84.

⁴⁰ Kustutik, “Konsepsi Kepemimpinan Pendidikan”, *Jurnal Lisan Al-Hal* , Vol. 12, Nomor 1 Juni, 2018, hlm. 198.

kerja sama.⁴¹ Pemimpin dalam mengerahkan tenaga, pikiran dan waktu untuk memenuhi harapan, pemimpin dapat menggunakan kecakapan dan keistimewaannya dengan memanfaatkan lingkungan dan potensi yang ada pada sebuah organisasi. Artinya, pemimpin berupaya melibatkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Kecakapan untuk menggerakkan, mengarahkan dan mempengaruhi anggota sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi sebagai wujud kepemimpinannya.⁴² Bennett dan Anderson mengungkapkan *Leadership has become a key concept in the organization, management and administration of educational organizations and systems, and this development is reflected in both academic and educational policy statement.* Artinya kepemimpinan menjadi hal urgen dalam organisasi manajemen atau administrasi organisasi pendidikan yang diaplikasikan dalam bentuk kebijakan pendidikan dalam suatu perguruan tinggi.⁴³

Oleh karena itu, manusia adalah makhluk hidup yang berbeda dari makhluk lainnya, yang

⁴¹ Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan ...*, hlm. 132-133.

⁴² Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 119.

⁴³ Uhar Suharsaputra, *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 357.

membedakannya adalah akal. Manusia menggunakan akal untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Manusia berpotensi menjadi seorang pemimpin minimal mampu memimpin diri sendiri. Dalam organisasi pemimpin menjadi panutan dalam segala hal, oleh karena itu pemimpin mampu mengendalikan, membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga juga tidak terlepas dari pemimpin dan kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, serta jiwa kepemimpinan yang ada pada seseorang bisa didapatkan melalui dari keturunan dan bisa juga melalui pengalaman-pengalaman.

2. Konsep Kebijakan Pendidikan

Istilah kebijakan berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris, yang memiliki mengelola problem baik kepentingan umum maupun tata usaha pemerintah. Kebijakan lebih ditekankan pada perilaku yaitu kebijakan yang ditentukan secara subjektif. Makna operatifnya, kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu penggarisan ketetapan-ketetapan. Kebijakan mempunyai sifat sebagai petunjuk, yang menjadi dasar dan arahan untuk

meraih persamaan dalam tujuan, proses dan cita-cita bagi setiap upaya dan kegiatan kelompok. Sehingga mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan gerak tindak yang menjadi satu dan sejalan mencapai tujuan bersama.⁴⁴ Kebijakan pendidikan yaitu gagasan yang sering orang tangkap, lafalkan, dan laksanakan, tetapi kerap kali tidak dimengerti sepenuhnya makna kebijakan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, apa maksud yang terkandung dengan kebijakan pendidikan. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu umum dan beraneka ragam, sehingga perlu ada kesepahaman terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut.⁴⁵

Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk melaksanakan tujuan pendidikan nasional. Berbagai kebijakan pendidikan dirancang untuk dilaksanakan atau diraih melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga pendidikan formal (resmi), dan informal (tidak resmi). Kebijakan pendidikan yaitu segenap proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dirinci dari visi serta misi pendidikan dalam melaksanakan

⁴⁴ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan ...*, hlm. 37.

⁴⁵ H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 16.

tercapainya tujuan pendidikan di masyarakat dalam masa waktu tertentu. Bentuk dari kebijakan pendidikan adalah undang-undang pendidikan, perintah presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan lain sebagainya yang menyangkut pendidikan.⁴⁶

Pra sebuah kebijakan dilakukan pastinya melalui prosedur yang panjang, prosedur itu bermula dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi pendidikan merupakan perolehan suatu proses komunikasi dan keikutsertaan yang berkesinambungan dari keseluruhan organisasi. Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah bentuk proses dari berbagai pilihan tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui cara kerja tertentu, dengan keinginan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik.⁴⁷ Dalam hal ini Stokey dan Zekhauser menjelaskan analisis kebijakan merupakan suatu proses langkah yang masuk akal (rasional) dengan memakai metode dan teknik yang masuk akal (rasional) juga.⁴⁸

⁴⁶ Galih R. N. Putra, *Politik Pendidikan ...*, hlm. 65.

⁴⁷ Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan ...*, hlm. 163.

⁴⁸ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 3.

Suatu ketetapan kebijakan meliputi tindakan oleh seorang pejabat atau institusi resmi untuk menyepakati, mengatur kembali, atau tidak menerima suatu pilihan kebijakan yang dipilih. **Dunn** menjelaskan membuat prosedur atau tahapan proses pembuatan dan perumusan kebijakan terbagi menjadi penyusunan agenda/masalah, formulasi kebijakan/agenda kebijakan, adopsi kebijakan/alternatif, implementasi kebijakan dan tambahannya diakhiri evaluasi.⁴⁹ Penjelasan proses kebijakan sebagai berikut:

pertama, perumusan/penyusunan masalah. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah utama yang mendasar dalam perumusan kebijakan. Agar dapat merumuskan kebijakan dengan benar dan baik, maka segala bentuk problem publik harus diidentifikasi dan didefinisikan dengan benar dan baik pula.⁵⁰

Kedua, agenda kebijakan. Artinya tidak semua problem masuk agenda kebijakan. Suatu problem masuk kategori ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalkan masalah tersebut mempunyai efek yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penyelesaian segera.

Ketiga, pemulihan alternatif untuk memecahkan

⁴⁹ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan ...*, hlm. 64.

⁵⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 19-20.

masalah. Langkah selanjutnya adalah membuat perumusan, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dipilih untuk mengatasi masalah tersebut.

Keempat, penetapan kebijakan. Setelah satu sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk mengatasi masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih.⁵¹ Setelah keempat proses pembuatan kebijakan yang terakhir adalah aktivitas penilaian atau evaluasi dari kebijakan yang telah diimplementasikan.⁵²

Masyarakat industri modern, pendidikan tinggi akan memiliki wewenang dalam arti mempunyai program pendidikan yang luwes, mudah dan cepat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keadaan institusi terkait. Otonom itu berupa program akademik, rekrutmen tenaga pendidik, keuangan dan kebijakan pendidikan tinggi lainnya. Fungsi pendidikan tinggi sebagai pusat penelitian dalam masyarakat industri modern memang sesuai karena spesialisasinya mendapat dukungan penuh dari dunia industri serta pusat-pusat penelitian yang lain. Universitas akan menjadi pusat

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 21-22.

⁵² M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan ...*, hlm. 66.

dari berbagai kegiatan keilmuan, penelitian sehingga lembaga itu menjadi universe-city.⁵³

Kebijakan yang diterapkan setiap lembaga pendidikan merupakan untuk menjalankan amanah tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kebijakan apapun yang ditetapkan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga berdampingan dengan tujuan pendidikan nasional. Langkah-langkah yang diambil oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga dalam pembuatan, perumusan dan penetapan sebuah kebijakan harus dengan bijak. Selain itu, skill menyusun pertemuan/rapat mengambil keputusan diperlukan seorang Rektor agar memutuskan kebijakan yang bijaksana.

3. Konsep Maqashid Syari'ah

Jika dipisahkan maqashid syari'ah terdiri dari dua unsur kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* bahasa arab yang berarti kesengajaan atau tujuan-tujuan. Arti *syari'ah* adalah lintasan/jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini didefinisikan juga sebagai jalan ke arah sumber utama kehidupan.⁵⁴ Al-Maqashid dapat dianggap sebagai sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak

⁵³ H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 179.

⁵⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61.

yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan syariat islam seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan.⁵⁵

Makna dari maqashid syari'ah adalah kemaslahatan, kemaslahatan ini melewati analisis maqashid syari'ah tidak hanya dalam arti teknis semata, akan tetapi dalam usaha dinamika dan pengembangan hukum dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai filosofis dari hukum-hukum yang diperintahkan Khaliq kepada makhluk-Nya.⁵⁶ Maqashid syari'ah bermaksud meraih, melindungi dan menjaga kemaslahatan bagi manusia, khususnya umat Islam.⁵⁷

Maqashid syari'ah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dapat ditelaah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang masuk akal bagi rumusan suatu hukum yang menitikberatkan kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq As-Syatibi memaparkan hasil karya penelitian ulama-ulama terhadap ayat suci Al-

⁵⁵ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Penj Ali Abdulmon'im, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 5.

⁵⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah ...*, hlm. 65-66.

⁵⁷ Yudian Wahyudi, *Usul Fikih Versus ...*, hlm. 45.

Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemaslahatan menurut As-Syatibi terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁵⁸

Kemaslahatan telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, tergantung elemen yang dipandang oleh seorang ulama diantaranya elemen keniscayaan, elemen hukum yang berusaha mencapai kemaslahatan, golongan manusia yang diliputi maqashid dan tingkat universalitas maqashid. Elemen keniscayaan terbagi menjadi lima yaitu penjagaan agama (hifzud din), penjagaan jiwa (hifzun nafs), penjagaan harta (hifzul mal), penjagaan akal (hifzul aql) dan penjagaan keturunan (hifzun nasl). Beberapa ulama menambah penjagaan kehormatan (hifzul ird), untuk melestarikan atau menjaga keenam tersebut keharusan, yang tidak bisa jika tidak ada, jika kehidupan manusia berlangsung dan berkembang.⁵⁹

Jadi maqashid syari'ah adalah kemaslahatan yang ingin diraih sesuai dengan syariat Allah.

⁵⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

⁵⁹ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula ...*, hlm. 7-8.

Adapun unsur-unsur kemaslahatan yang perlu dilindungi ialah penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta.



Tabel 2
 Prosedur Penelitian

KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN UIN SUNAN KALIJAGA
PERIODE 2016-2020 DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

No	Permasalahan	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Pendekatan	Teori
1	Peran, Sumber, Alur pembuatan dan penetapan kebijakan di UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020	Peran Rektor, Wakil Rektor I, II, dan III dalam pengambilan keputusan	Wakil Rektor I, II, dan III	Wawancara mendalam, dan triangulasi	Deskriptif Interaktif Miles & Huberman	Deskriptif	(1) Teori alur/prosedur pembuatan kebijakan (Dunn), (2) Teori Great Man (Bennis dan Nanus) dan Teori <i>Environtment</i> (V.H Vroom dan Philip Yellow) tentang pemimpin dilahirkan atau diciptakan. (3) Bennett dan Anderson
2	Beberapa kebijakan-	Kebijakan PBAK	Wakil Rektor	Wawancara mendalam,	Deskriptif Interaktif	Deskriptif	Teori analisis kebijakan (Stokey dan Zekhauser) dan

	kebijakan Akademik dan kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020 dilihat dari perspektif maqashid syari'ah	(Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Kebijakan pelarangan Cadar Kebijakan Pondok Pesantren satu tahun bagi mahasiswa baru	I, II, III dan delapan mahasiswa	dokumentasi, dan triangulasi	Miles & Huberman		Maqashid Syari'ah (Abu Ishaq As-Syatibi) (Jaser Audah)
--	---	--	----------------------------------	------------------------------	------------------	--	---



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kebijakan pimpinan ini peneliti menggunakan metode kualitatif, artinya adalah langkah-langkah pasti (prosedur) penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (informan) dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh, hal ini berarti bahwa individu tidak boleh dipisahkan atau diorganisasikan kevariabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai bagian dari suatu kesatuan yang utuh. Jadi secara singkat kata kualitatif ditekankan pada makna dan proses, bukan pada pengukuran dan pengujian secara kaku (rigid) sebagaimana yang terjadi pada metode kuantitatif. Kemudian juga bisa diartikan bahwa pada hakikatnya penelitian kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori/informasi baru dari kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori.⁶⁰

2. Subjek Penelitian

Penelitian sering digunakan populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan perkara

⁶⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 21-22.

yang diteliti, baik berupa orang (informan) yang menjadi titik fokus, benda, peristiwa, fenomena, nilai maupun hal-hal yang terjadi. Adapun sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diamati dan diteliti.⁶¹ Teknik pengumpulan sampel dengan *purposive sampling*, artinya proses/cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan (mengetahui, memahami dan mengalami) dan tujuan tertentu.⁶² Palys memberikan pembagian beberapa jenis *sampling* lain sebagai bagian variasi dari *purposive sampling* salah satunya adalah sampling pemangku kepentingan (*stakeholder*).⁶³

Hal ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh *stakeholder* UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang menjadi informan penelitian ini Yudian Wahyudi selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang diwakilkan oleh Wakil Rektor II, Sutrisno selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Sahiron S selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

⁶¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 215.

⁶² *Ibid.*, hlm. 221.

⁶³ Tatang Ary Gumanti, Yunidar, dan Syahruddin, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 200.

Waryono Abdul Ghafur selaku Wakil Rektor III Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan delapan mahasiswa berbagai jurusan dan fakultas untuk menambah informasi yang diinginkan peneliti. Adapun mahasiswanya adalah Dela, Indah Komalasari, Quratul Aini, Muhammad Ifan Nur Afuddin, Siti Nur Atika, Angga Eka Tama, Mochammad Ja'far Amri Amanulloh dan Ariani Yuniarti.

3. Lokasi dan Waktu

Peneliti telah melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga Periode 2016-2020 dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Perspektif Maqashid Syari’ah” pada November 2019 sampai dengan Februari 2020. Lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55281.



4. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Kesuksesan dalam pengumpulan data dan informasi ditentukan oleh kecakapan peneliti mengambil, mencari, dan mendapatkan data/informasi secara mendalam yang menjadi fokus penelitian. Beberapa cara pengumpulan data dan informasi dalam penelitian kualitatif sebagai berikut observasi (mengamati), wawancara (mengajukan pertanyaan), dan dokumentasi (gambar, data, dokumen).

Pertama, observasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui atau mencari dan menemukan tingkah laku nonverbal artinya mengamati sebuah peristiwa. Dalam penelitian ini peran peneliti dalam kelompok kegiatan sebagai *non participation observer*. Artinya bentuk observasi di mana peneliti tidak terlibat langsung dan tidak ikut serta dalam kegiatan kelompok tersebut.⁶⁴ Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengelolaan perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga, proses pengambilan keputusan dan manajemen konflik dari sebuah kebijakan pihak kampus baik dari internal maupun eksternal melalui website UIN SUKA dan karya-karya Rektor.

⁶⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 384.

Kedua, wawancara mendalam. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁶⁵ Peneliti juga mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan judul seperti peran, sumber dan alur kebijakan UIN Sunan Kalijaga, kepemimpinan Rektor, dan beberapa kebijakan yang telah diputuskan atau yang telah dicabut kembali, serta menganalisis kebijakan-kebijakan tersebut perspektif maqashid syari'ah.

Ketiga, dokumen merupakan catatan seseorang tentang informasi yang diinginkan peneliti dan sesuai fokus penelitian. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar dan foto.⁶⁶ Analisis dokumen seperti otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, buletin dan foto-foto.⁶⁷ Dokumen yang dicari terkait judul seperti profil (sejarah, struktur dll) UIN Sunan Kalijaga, dan beberapa SK (Surat Keputusan) Rektor

⁶⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

⁶⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif* ..., hlm. 391.

⁶⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ..., hlm. 195.

tentang kebijakan yang telah ditetapkan maupun yang telah dicabut kembali.

Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti sebelum ke lapangan adalah mengkaji dan mencari informasi terkait fokus penelitian. Informasi dari media mengenai kebijakan Rektor, dan untuk menambah keyakinan peneliti dalam mencari informasi, peneliti telah mencari karya-karya informan dan mencari artikel jurnal yang mengkaji sesuai dengan fokus peneliti yaitu Kebijakan Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga Periode 2016-2020 dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Perspektif Maqashid Syari'ah.

5. Teknik Analisis Data

Penguraian (Analisis) data merupakan proses mencari dan mengatur salinan (transkip) wawancara, catatan lapangan (observasi), dan data/informasi lain yang telah dihimpun/dikumpulkan oleh peneliti secara sistematis. Kegiatan penguraian (analisis) ini dilakukan dengan mengolah data, menyusun, membagi menjadi satuan-satuan (elemen) yang dikelola, menyintesis, mencari pola (corak) dan menemukan apa yang bermakna dan apa yang ditelaah serta dilaporkan secara teratur dan sistematis. Data dan informasi itu terdiri dari

pemaparan yang jelas dan rinci mengenai kondisi, peristiwa/kejadian, orang, interaksi dan perilaku.⁶⁸

Peneliti mulai awal membaca dan menganalisis data yang telah didapatkan/terkumpul, baik berupa salinan (transkip) wawancara, catatan lapangan (observasi) dan dokumen serta melakukan uji keabsahan dengan teknik triangulasi. Adapun teknik (cara) analisis data yang dilakukan peneliti adalah analisis pra ke lapangan, analisis selama dan setelah (pasca) ke lapangan. Teknik (cara) analisis sebelum ke lapangan dapat dilakukan dengan studi pendahuluan maupun data sekunder baik berupa dokumentasi, buku, jurnal, karya, foto, dan informasi material lainnya yang berhubungan dengan fokus yang akan diteliti.⁶⁹

Analisis selama dan setelah (pasca) di lapangan banyak tipe analisis data yang dapat dilakukan sesuai dengan tipe dan strategi penemuan yang digunakan. Teknik (cara) analisis data ini mengambil teori Miles dan Huberman dengan mengikuti tipe alir. Dalam model ini peneliti melakukan beberapa prosedur; pertama, reduksi data. Artinya proses pemilihan, kemudahan,

⁶⁸ Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi ...*, hlm. 230.

⁶⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 400-401.

pembedaan, dan pentransformasian data belum diolah (mentah) yang terlihat dalam catatan tertulis dilapangan. Tahap reduksi data terbagi menjadi 9 (sembilan) langkah yaitu memilih dan meringkas dokumen yang relevan, pengkodean, pembuatan catatan obyektif, reflektif, marginal, penyimpanan data, membuat memo, analisis antarlokasi informan dan pembuatan ringkasan sementara antarlokasi. Kedua, data display. Artinya display kumpulan data dan informasi yang telah tersusun yang memudahkan dalam penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display dalam penelitian kualitatif yaitu teks uraian (naratif) dan kejadian lampau. Tahap kedua ini peneliti menyajikan dan menampilkan data yang telah dianalisis sebelumnya karena menyusun teks naratif. Penyajian data diarahkan pada data hasil yang terorganisir dalam pola hubungan. Ketiga, simpulan dan verifikasi. Peneliti mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola (corak), penjelasan, bentuk/wujud, alur sebab akibat dan perbandingan. Simpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.⁷⁰ Artinya penarikan simpulan sejak awal telah mengumpulkan data dan informasi, peneliti mencatat dan memberi makna sesuatu yang

⁷⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 248.

dilihat atau data yang didapatkan. Ketiga teknik analisis data diatas saling berhubungan timbal balik.⁷¹

Teknik (cara) analisis data yang dipakai peneliti yaitu teori Miles dan Huberman. Dalam kerangka model alir yaitu reduksi data, data display dan penarikan simpulan. Pada saat peneliti melakukan reduksi data pada dasarnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan sementara dan pada saat mengambil penarikan kesimpulan berpedoman dari reduksi data dan data yang di display.

6. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian peneliti melakukan triangulasi sebagai bentuk teknik (cara) pengumpulan data untuk menguji keabsahan data dan informasi, mendapatkan temuan dan pemberian kesan, pendapat atau pandangan (interpretasi) data yang lebih teliti, seksama, cermat, akurat dan dapat dipercaya (kredibel). Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber informan yang banyak.⁷²

⁷¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 407-409.

⁷² *Ibid.*, hlm. 395.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, Peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa Bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, pada Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang urgensi dan permasalahan yang dikaji dari penelitian.

Bab II menjelaskan gambaran umum tentang sejarah dan periodisasi kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga, menjelaskan visi misi tujuan dan *core values* UIN SUKA.

Bab III hasil penelitian menjelaskan Peran, alur dan prosedur pembuatan dalam penetapan kebijakan-kebijakan UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020. Menganalisis beberapa kebijakan kepemimpinan periode 2016-2020 perspektif maqashid syari'ah, adapun diantaranya (1) kebijakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). (2) kebijakan terkait pelarangan cadar dan pencabutan pelarangan tersebut. (3) kebijakan terkait mahasiswa baru menetap dan pondok pesantren selama dua semester.

Bab IV merupakan penutup yang berisi hasil dari penelitian berupa jawaban terhadap rumusan masalah, temuan penelitian, dan saran-saran. Pada Bab ini merupakan rangkuman dari pembahasan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM UIN SUNAN KALIJAGA

A. Sejarah Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga

Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mengalami periodisasi kepemimpinan yang terbagi menjadi beberapa tahapan, adapun pembagiannya sebagai berikut:⁷³

Pertama, pada periode ini, PTAIN berada di bawah kepemimpinan KHR Moh Adnan (1951-1959) dan Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (1959-1960). Adapun yang terjadi pada masa ini penegerian Fakultas Agama UII menjadi PTAIN, penyatuan PTAIN dan ADIA serta pembentukan IAIN dengan sebutan Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah.

Kedua, pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. R.H.A. Soenaryo, S.H. (1960-1972). Beberapa hal yang telah dilakukan pada masa ini ialah peletakan landasan peresmian IAIN dan pemisahan IAIN pusat di Yogyakarta dan di Jakarta. Pada masa ini dilakukan pembangunan sarana prasarana, materi kurikulumnya berkiblat ke Universitas Al-Azhar.

Ketiga, Pada periode ini, 1972 - 1996 periode peletakan landasan akademik IAIN Sunan Kalijaga

⁷³ Tim CTSD UIN Sunan Kalijaga, *Sukses di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: CTSD UIN SUKA, 2014), hlm. 7-11.

dipimpin oleh Kolonel Drs. H. Bakri Syahid (1972-1976), Prof. H. Zaini Dahlan, MA (selama 2 masa jabatan: 1976-1980 dan 1980-1983), Prof. Dr. HA Mu'in Umar (1983-1992) dan Prof. Dr. Simuh (1992-1996) perubahan yang telah dilakukan pemimpin pada masa ini ialah peletakan landasan akademik, pembangunan sarana prasarana kampus, dan berubahnya sistem pendidikan yang sistem bebas ke sistem terpimpin. Seiring waktu kurikulum IAIN mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan nasional bangsa Indonesia dan bertambahnya beberapa fakultas dan pada periode ini juga pertama kali dibukanya program pascasarjana yang disebut dengan *Post Graduate Course* (PGC) dan Studi Purna Sarjana (PPS).

Keempat, Pada periode ini, 1996 - 2001 periode pemantapan akademik dan manajemen IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar (1997-2001). Pemimpin pada masa ini selalu melakukan pemantapan akademik seperti mutu dosen yang didorong untuk meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi, mutu tenaga administratif, mutu alumni dan manajemen IAIN.

Kelima, Periode ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah (2001-2005) dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof. Drs. H. Akh.

Minhaji, MA., Ph.D, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Drs. H. Masyhudi, BBA, M.Si. dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. H. Ismail Lubis, MA (Almarhum) yang kemudian digantikan oleh Dr. Maragustam Siregar, MA. Pada periode kedua (2006-2010) dari kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah telah dibentuk Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama. Perubahan dalam manajemen pada masa ini pengembangan kelembagaan yang disebut periode transformasi, artinya perubahan IAIN menjadi UIN. Perubahan Institut ke Universitas dilakukan untuk mencanangkan paradigma integrasi interkoneksi.

Keenam, Periode ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Musa Asy'arie dibantu oleh empat Pembantu Rektor yaitu: Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. H. Ahmad Rifai,. M.Phil., dan Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A. Periode ini disebut kebersamaan dan kesejahteraan, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi organisasi tata kerja UIN perlu ditata kembali yaitu Rektor dibantu oleh tiga

wakil rektor yang sebelumnya dibantu oleh 4 wakil rektor.

Ketujuh, Periode ini (2014-2016) di pimpin oleh Prof. Akh. Minhaji, Ph.D dan dibantu tiga (3) Wakil Rektor yakni Wakil Rektor I Prof. Dr. Sutrisno, M. Ag., selaku Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. meneruskan pembangunan dan mengembangkan UIN Sunan Kalijaga. Wakil Rektor II Dr. Waryono, M. Ag., selaku Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Wakil Rektor III Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA., Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Fokus penelitian ini kebijakan kepemimpinan Rektor Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., periode 2016-2020 dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada masanya baik kebijakan yang telah ditetapkan maupun yang telah dicabut. Pada periode ini Rektor dibantu oleh tiga (3) Wakil Rektor Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H.Sutrisno, M.Ag. Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Phil. Sahiron, M.A. dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. H. Waryono, M.Ag.

B. Visi Misi Tujuan dan *Core Values* UIN Sunan Kalijaga

Setelah menjelaskan periodisasi kepemimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak kalah penting adalah visi, misi, tujuan, dan *core values* UIN Sunan Kalijaga ialah:⁷⁴

Visi adalah cita-cita lembaga yang memang mesti bagus dan tinggi, mewujudkan visi lembaga memerlukan sentuhan pemimpin. Orang bisa saja menduduki jabatan pemimpin tapi belum tentu kinerjanya menunjukkan bahwa ia benar-benar pemimpin sejati.⁷⁵ Adapun visi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “Unggul dan Terkemuka dalam Pemaduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban”. Untuk menjalankan visi tersebut beberapa langkah nyata yang dilakukan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang disebut misi yakni (1) memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran. (2) Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan

⁷⁴ UIN SUKA, “Sekilas”, dalam <http://www.uinsuka.ac.id/id/page/universitas/71-sekilas>. Diakses tanggal 12 januari 2020.

⁷⁵ Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 125.

akademik dan masyarakat. (3) Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani. (4) Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Visi misi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga memiliki tujuan diantaranya (1) menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkoneksi. (2) Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan. (3) Menghasilkan sarjana yang yang menghargai dan menjawai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan. (4) Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkoneksi. (5) Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

UIN Sunan Kalijaga memiliki *core values* diantaranya; Integratif-Interkoneksi artinya sistem keterpaduan dalam pengembangan akademik, manajemen, kemahasiswaan, kerjasama, dan entrepreneurship. Dedikatif-Inovatif artinya bersikap dedikatif, amanah, pro mutu, berpikir dan bergerak

aktif, kreatif, cerdas, dan inovatif; tidak sekadar bekerja rutin dan rajin. Inklusif-Continuous Improvement artinya bersifat terbuka, akuntabel, dan komit terhadap perubahan dan keberlanjutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul Kebijakan Kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020 dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Perspektif Maqashid Syari'ah, peneliti mengambil kesimpulan. Adapun kesimpulan dibawah ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya.

1. Peran sumber dan alur kebijakan serta kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga
 - a) Peran sumber dan alur kebijakan di sebuah lembaga pendidikan Islam terbagi dua pertama, bersifat sentral yang berasal dari Kementerian Agama dan kedua, yang bersifat desentral yang mana sebuah kebijakan berasal dari internal (UIN Sunan Kalijaga). Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi; (a), perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; (b) pelaksanaan kegiatan teknis teknis yang berskala nasional dan daerah; (c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; (d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di

daerah; dan (e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.

b) Organisasi Universitas yang bertanggung jawab dalam membuat dan memutuskan kebijakan terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor; Senat Universitas; Senat Fakultas; Satuan Pengawas Internal; Dewan Penyantun; dan Dewan Pengawas. Perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga pada masa jabatan 2016-2020 dipimpin oleh Rektor Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Rektor juga dibantu oleh beberapa Wakil Rektor diantaranya Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H.Sutrisno, M.Ag. Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Phil. Sahiron, M.A. dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. H. Waryono, M.Ag.

B. Analisis kebijakan UIN SUKA perspektif maqashid syari'ah sebagai berikut:

a. Kebijakan PBAK dari segi maqashid syari'ah adalah (1) hifzuddin, demi menjaga agama dalam aspek ibadah kampus memberikan waktu kepada mahasiswa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai muslim sholat fardhu. Selain itu mahasiswa juga sebelum melakukan aktifitas

diperintahkan untuk sholat dhuha dilanjutkan adanya materi islam moderat. (2) Hifzun nafs, penjagaan jiwa yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga dalam kebijakan PBAK ialah mengatur waktu kegiatan pada pagi harinya sehingga mahasiswa dapat sarapan terlebih dahulu. (3) hifzul aqli, kebijakan PBAK terdapat kemaslahatan yang memelihara akal mahasiswa yaitu adanya materi keindonesiaan, keislaman dan juga Rektor beserta jajarannya memberikan motivasi agar menjadi mahasiswa yang taat agama, bangsa dan negara. (4) Hifzul nasl/irdi, memelihara keturunan berkembang menjadi kepedulian kepada keluarga, ketika kebijakan PBAK diserahkan kepanitiaannya kepada dosen ini bentuk penjagaan amanah yang orang tua kasih kepada perguruan tinggi. (5) Hifzul mali, kebijakan PBAK bertujuan juga menjaga harta mahasiswa dengan tidak adanya pungutan liar pada pendaftaran PBAK, karena seluruh biaya kegiatan PBAK di fasilitasi oleh pihak Universitas.

- b. Kebijakan cadar dipandang perspektif maqashid syari'ah sebagai berikut: (1) Hifzuddin, sebenarnya tidak ada yang salah ketika mahasiswa memakai cadar di lingkungan UIN

Sunan Kalijaga. Masalahnya adalah ketika mahasiswa bercadar mengembangkan bendera HTI di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan HTI telah dibubarkan oleh pemerintah dan ditakutkan terdapat mahasiswa terlibat dan terpengaruh oleh paham yang menentang negara. Ini bukti bahwasanya UIN Sunan Kalijaga menjaga agama mahasiswa. (2) Hifzun nafs, sudah jelas ketika kebijakan ini ditetapkan secara tidak langsung UIN Sunan Kalijaga terutama Rektor sebagai pemimpin institusi tidak ingin jiwa mahasiswa rusak, maka ada penjaringan sebagai bentuk identifikasi mahasiswa yang terlibat dalam pembentangan bendera HTI. (3) Hifzul aql, dikeranakan adanya mahasiswa yang bercadar pada waktu ujian dan tes (TOEFL) tidak orang yang sama sehingga cadar dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. (4) Hifzul irdi/nasl, kebijakan pelarangan cadar ini melindungi hak-hak negara, institusi dan mahasiswa dari aliran-aliran yang tidak sejalan dengan pemerintah. Karena mahasiswa merupakan generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan pahlawan yang telah mempertahankan NKRI. (5) Hifzul mali, ketika mahasiswa diamanahkan untuk menuntut ilmu oleh orang tua, orang tua telah

membiayai anaknya dan menginginkan anaknya belajar dengan serius. Dengan adanya palarangan ini tidak ada lagi tindak kejahatan dalam proses belajar mengajar yang menjadikan cadar sebagai alat. UIN Sunan Kalijaga juga mencabut kembali kebijakan tersebut demi untuk menjaga kemaslahatan bersama. Artinya UIN Sunan Kalijaga tidak ingin terjadinya perang saudara dikarenakan tetap memikirkan berbagai masukan dan kritikan dari sudut pandang.

- c. Kebijakan pondok pesantren satu tahun bagi mahasiswa baru perspektif maqashid syari'ah, ialah (1) hifzud din, perkara penjagaan agama sudah jelas nyata bahwa mahasiswa yang pondok pesantren tujuannya agar mahasiswa jurusan kategori umum misalnya (SAINTEK) dan jurusan agama sekalipun dapat memahami agama secara mendalam. (2) Hifzul nafs, menurut Jaser Audah maqashid syari'ah mampu menghasilkan perlindungan dan pembangunan sumber daya manusia.¹⁸² Dalam hal ini UIN Sunan Kalijaga mengharapkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidikmisi ketika dipondokkan selama satu tahun dapat memadukan keilmuan agama

¹⁸² Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 7, No. 1, November 2017, hlm. 140.

dan ilmu umum tanpa adanya dikotomi keilmuan.

(3) Hifzul aqli, ketika mahasiswa baru baik yang lulusan/berasal dari aliyah dan pesantren maupun tidak dipondokkan selama dua semester, mereka diberikan kesempatan dapat mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. (4) Hifzul nasl/irdi, penjagaan keturunan dan kehormatan disini dikaitkan dengan lulusan/alumni dan pengakuan lembaga oleh masyarakat. Ketika mahasiswa baru telah dibekali pondok satu tahun benar-benar mampu mengintegrasikan Al-Quran dan hadis ke dalam keilmuan yang mereka pelajari di kampus. Kemudian dibekali islam moderat tanpa mudah melabeli seseorang sesat, dibekali cinta terhadap negara sehingga mampu menghargai budaya Indonesia. (5) Hifzul mali, mahasiswa dipondokkan selama satu demi menjaga harta negara karena yang dipondokkan merupakan mahasiswa yang mendapat bidikmisi. Negara mengharapkan mahasiswa yang telah diberikan bantuan berupa materi dapat lulus dengan tepat waktu.

B. Saran

Perjalanan penggeraan tugas akhir ini peneliti pastinya banyak menemukan kekurangan dan kelebihan lokasi yang menjadi tempat penelitian. Peneliti

memberikan saran dan masukan untuk stakeholder UIN Sunan Kalijaga seperti Rektor, Wakil Rektor, Mahasiswa sebagai berikut:

1. Rektor dan Wakil Rektor tetap konsisten mempertahankan kemaslahatan bersama dalam pengambilan kebijakan.
2. Rektor dan Wakil Rektor, khususnya Wakil Rektor III mengevaluasi kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan dalam hal pembagian waktu per acara sehingga acara sesuai dengan rundown yang telah disepakati. Kalaupun itu tidak sesuai dengan rundown acara setidaknya tidak mengulur banyak waktu. Untuk jumlah panitia fakultas ditambahkan menjadi 15%-20% dari jumlah mahasiswa baru agar mahasiswa tidak kesusahan dalam mengatur mahasiswa yang skalanya besar.
3. Rektor dan Wakil Rektor, khususnya Wakil Rektor II bidang Perencanaan, Administrasi Umum dan Keuangan kalau bisa waktu untuk mengumumkan mahasiswa yang mendapat beasiswa bidikmisi tidak pada saat mahasiswa telah masuk dalam perkuliahan. Karena ketika telah masuk mahasiswa telah mencari kos-kosan, jadi ketika mahasiswa tersebut mendapat beasiswa bidikmisi harus masuk pondok selama satu tahun sedangkan sebagian telah

membayar kosan. Sehingga sebagian mahasiswa uang bidikmisinya habis untuk membayar pondok dan kos-kosan.

4. Rektor dan Wakil Rektor, khususnya Wakil Rektor III bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan tetap mengevaluasi mahasiswa yang bercadar ketika masuk ke perguruan tinggi dan dalam proses belajar mengajar. Sehingga peraturan dalam buku panduan akademik tidak sebatas peraturan.
5. Mahasiswa mampu memahami dan meyakini setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan UIN Sunan Kalijaga untuk kepentingan bersama. Sehingga mahasiswa dapat membantu tujuan dari perguruan tinggi yaitu menjalankan tridharma perguruan tinggi.
6. Masyarakat baik itu organisasi masyarakat, media massa maupun masyarakat secara luas tidak mudah memberikan stigma liberal, berkiblat ke barat dikarenakan sebuah kebijakan. Setiap instansi memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan dan setiap kebijakan yang telah dibuat mempertimbangkan baik buruknya. Kalaupun kebijakan tersebut menimbulkan kegaduhan setidaknya masyarakat bisa memberikan masukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal., *Manajemen Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga*, Penj Muhammad Al-Baqir, Jakarta: Mizania, 2015.
- Al-Qaradhawi, Syaikh Yusuf., *Fiqh Maqashid Syari'ah*, Penj Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Arifin, Zainal, *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen Hikmah Idariyah dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Audah, Jaser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Baharuddin dkk, *Reorientasi Tradisi Perguruan Tinggi Islam Menuju World Class University*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Gumanti, Tatang Ary, Yunidar, dan Syahruddin, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Hasbullah, M, *Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Hermino, Agustinus, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Hilmi, Ahmad, *Hukum Cadar Bagi Wanita*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata Laksana, *Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2014*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014.

Kustutik, “Konsepsi Kepemimpinan Pendidikan”, *Jurnal Lisan Al-Hal* , Vol. 12, Nomor 1, 2018.

Kuswantoro, Agung, Ismiyati, dan Hana Netty Purasari, “Kepemimpinan Bertumbuh (Studi Kasus Kepemimpinan Rektor UNNES)”, *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2019.

Maharrani, Elsa, Isniati, dan Adila Kasni Astiena, “Studi Implementasi Kebijakan Larangan Merokok di Universitas Andalas Tahun 2012”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9, Nomor 1, 2015.

Mahmud, *Manajemen Pendidikan Tinggi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: LkiS Group, 2010.

Mayasari, Linda Ika, "Leadership dan Birokrasi Perguruan Tinggi", dalam HIKMAH Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, Nomor 1, 2017.

Miskari, "Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syari'ah dalam Perspektif Jaser Audah", dalam *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 14, Nomor 1 April 2018.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Musfah, Jejen, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Musfah, Jejen, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2015.

Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2011.

Nurkhoti'ah, Siti, *Efektivitas Pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Nomor 3901/H.31/Kep/2008 Tahun 2008 tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian di UPBJJ-UT Surakarta*, Universitas Terbuka Surakarta: Laporan Penelitian Madya, 2010.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Pasal 23 Ayat 1.

Perianto Ricky, yang berjudul "Pemetaan Stakeholders dalam Penetapan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Riau Tahun 2013", *JOM FISIP*, Vol. 3, Nomor 1, 2016.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Pulungan, Nur Azizah, *Pakaian Syar'i: Harus Segitunya Kah?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Putra, Galih R. N, *Politik Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Rahayu, Wiga, "Profil Wanita Bercadar (Studi Kasus Wanita Salafi di Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)", dalam *JOM FISIP* Vol. 3, Nomor 1, Februari 2016.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rasyid, Lisa Aisyah, "Problemtika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16, Nomor 1, 2018.

Rifqi, Ainun Nida, dan Ika Febrian Kristiana, "Kepemimpinan Dalam Setting Instansi Pendidikan Tinggi (Sebuah Studi Kasus pada Pemimpin/ Rektor Universitas Negeri Makassar)", *Jurnal Empati*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2017.

Riyan, "Implementasi Kemandirian dan Jiwa Sosial (Life Skills) Santri di Pesantren", dalam Ilmu Al-Qur'an (IQ) *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, Nomor.2, 2018.

Setyaningsih, Rini, "Kebijakan Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Pembentukan Kultur Mahasiswa (Studi Terhadap Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta)", Tesis: Yogyakarta. Program Studi Magister Pendidikan Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Setyawan, Muhammad Arif, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren", dalam Manageria: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4, Nomor 1, Mei 2019.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Soleh, Akhmad, "Kebijakan Peguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, Nomor 1, 2014.

Suharsaputra, Uhar, *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Sunaryo, Agus, Identitas Pesantren vis a vis Perubahan Sosial (Kajian atas Derivasi Makna dan Konsep Pesantren dalam Program Pesantrenisasi Mahasiswa dan Pesantren Mitra IAIN Purwokerto), Laporan Penelitian Individual: IAIN Purwokerto, 2015.

Syafar, Djunawir, "Birokrasi, Perilaku dan Budaya Organisasi dalam Lembaga Pendidikan Islam Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", dalam Manageria: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, Nomor 2, November 2017.

Tilaar, H.A.R, dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Tilaar, H.A.R, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Tim CTSD UIN Sunan Kalijaga, *Sukses di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: CTSD UIN SUKA, 2014.

Ulum, Amirul, dan Eko Setiawan yang berjudul, "Analisis Konten Dan Kebijakan Akses Institutional

Repository”, *Jurnal Pustakaloka*, Vol. 8, Nomor 1, 2016.

Usman, Husaini, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Wahab, Abdul Aziz, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta: Nawasea Press, 2015.

Wahyudi, Yudian, *Usul Fikih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.

Wiyono, Teguh, *Kebijakan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Kemitraan dengan Pondok Pesantren dalam Peningkatan Mutu*, Tesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Wulansasi, Ajeng, dan Ahmad Aji Jauhari Ma'mun, "Karakteristik Kepemimpinan dalam Dunia Pendidikan untuk Merespon Era Disrupsi", dalam Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4, Nomor 2, November 2019.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2015.

Zainiyati, Husniyatus Salamah, “Model Kurikulum Integratif Pesantren Mahasiswa dan UIN Maliki

Malang”, dalam Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 18, Nomor 1, Juni 2014.

Rujukan Web

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Kemenag: Mahasiswa Baru PTKIN Harus Bersinergi Tangkal Radikalisme dan Intoleran”, Dalam <http://www.pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=9834#.XpApAWkxeDY>. Akses 10 April 2020.

Fernan Rahadi, “Wali Mahasiswa Keluhkan Kewajiban Mondok MABA UIN Suka”, dalam <https://republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/pew4sc291/wali-mahasiswa-keluhkan-kewajiban-mondok-maba-uin-suka>. Akses tanggal 14 September 2019.

Fiqih Rahmawati, “Soal Wajib Mondok, Waryono Akhirnya Angkat Bicara”, dalam <https://lpmrhetor.com/soal-wajib-mondok-waryono-akhirnya-angkat-bicara/>. Akses tanggal 13 september 2019.

Heru Triyono, “Yudian Wahyudi: Engga Ada Perintah Cadar dalam Al-qur-an”, dalam <https://beritagar.id/artikel/bincang/yudian-wahyudi-enggak-ada-perintah-cadar-dalam-quran>. Akses tanggal 10 September 2019.

Ibadah.co.id, “Mahasiswa Baru UIN Yogyakarta Mesantren selama dua semester”, dalam <http://ibadah.co.id/2019/02/13/mahasiswa-baru-uin-yogyakarta-wajib-mesantren-selama-2-semester/amp/>. Akses pada tanggal 13 September 2019.

Juli Hantoro, “Ternyata Rektor Yudian Wahyudi Ancam Pecat Mahasiswi Bercadar Itu Pengurus NU Jogja”, dalam <https://www.nahimunkar.org/ternyata-rektor-yudian-wahyudi-yang-ancam-pecat-mahasiswi-bercadar-itu-pengurus-nu-jogja-2/>. Akses tanggal 9 september 2019.

M. Rahmat Zain, “Kejahatan Birokrasi Kampus”, dalam <https://lpmrhetor.com/kejahatan-birokrasi-kampus/>.
Akses tanggal 9 September 2019.

Purnomo Edi, “Rektor UIN Sunan Kalijaga Cabut Surat Pendataan Mahasiswi Bercadar”, dalam <https://m.merdeka.com/peristiwa/rektor-uin-yogyakarta-cabut-surat-pendataan-mahasiswi-bercadar.html>. Akses tanggal 12 September 2019.

Risalah Muslim.id,”HR.Bukhari:4789-Tentang Setiap Kalian Adalah Pemimpin”, dalam <https://risalahmuslim.id/setiap-kalian-adalah-pemimpin/>, Akses tanggal 2 Mei 2020.

UIN SUKA, “Informasi Pondok Pesantren yang Direkomendasikan”, dalam <http://uin-suka.ac.id/id/pengumuman/detail/492/informasi-pondok-pesantren-yang-direkomendasikan>. Akses tanggal 14 April 2020.

UIN SUKA, “Sekilas”, dalam <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/71-sekilas>. Akses tanggal 12 januari 2020.

UIN Sunan Kalijaga, “3667 Orang Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Ikut Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan”, dalam <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/83/3667-orang-mahasiswa-baru-uin-sunan-kalijaga-ikuti-pengenalan-bu>. Akses pada tanggal 18 September 2019.

Yud, "Soal Cadar, Rektor UIN Sunan Kalijaga Buat Kebijakan Baru", dalam <http://brt.st/5Os3>. Akses tanggal 11 September 2019.



Lampiran 1 Pengajuan Judul Tesis Jurusan Manajemen Pendidikan Islam



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGAJUAN PENYUSUNAN TESIS / TUGAS AKHIR

Hal : Pengajuan Penyusunan Tesis/Tugas Akhir

Kepada Yth:

Ketua Jurusan/Program Studi Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Riyan
NIM	:	18204090010
Jurusan/Program Studi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Semester	:	III (3)
Fakultas	:	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Mengajukan tema tesis/tugas akhir sebagai berikut:

- ① Kebijakan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Perspektif *Maqashid Syari'ah*.
2. Kepemimpinan Profetik dalam Pengelolaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Besar harapan saya salah satu tema di atas dapat disetujui. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penasihat Akademik

Dr. Sedya Santosa, SS, M. Pd.

NIP. 19630728 199103 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 9 September 2019
Pemohon

Riyan

NIM. 18204090010

Lampiran 2 Pengajuan Dosen Pembimbing Tesis

PENGAJUAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

Yogyakarta, 18 November 2019

Hal : Pengajuan Dosen Pembimbing Tesis

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riyand

NIM : 18204090010

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Semester : 3 (Tiga)

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Judul Penelitian : Kebijakan Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga dalam Pengelolaan Tinggi Perspektif *Magashid Syari'ah Pendidikan*

Mengajukan dosen pembimbing tesis (tugas akhir) sebagai berikut:

- 1. Dr. Zainal Arifin, M.S.I ✓
- 2. Dr. Imam Machali, M.Pd

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian bapak saya ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
Kaprodi Magister MPI

Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si
NIP. 19590525 198503 1 005

Pemohon (Mahasiswa)



Riyand
NIM. 18204090010

Lampiran 3 Kesediaan Pembimbing Tesis

Perihal: **Kesediaan Menjadi Pembimbing Tesis.**

Kepada Yth. :
Prof. Dr. H. Hamruni, M.S.I
Kajur/Prodi Magister (S2) MPI
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menjawab surat Saudara Nomor B-397c/Un.02/Magister/TU.00/11/2019 tanggal 19 November 2019 bersama ini saya menyatakan (bersedia / tidak bersedia*) menjadi Pembimbing Tesis yang berjudul: "KEBIJAKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH"

Tesis tersebut akan dikerjakan oleh:

Nama : Riyand
NIM : 18204090010
Prodi/Konsentrasi : MPI
Semester : III (tige)
Tahun Akademik : 2019/2020

Demikian, harap menjadi periksa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,

Hormat Kami, 26 November 2019

Dr. Zainal Arifin, M.S.I



Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589021, 512474 Fax. (0274) 586117
tarbiyah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B-1332/Un.02/DT/PG.00/11/2019

Lamp :-

Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tesis

Kepada Yth.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Jl Marsda Adisucipto
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa untuk memenuhi tugas akhir Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maka diperlukan Penelitian Tesis. Oleh karena itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian bagi mahasiswa kami :

Nama	: Riyandri
NIM	: 18204090010
Prodi	: MPI (Manajemen Pendidikan Islam)
Judul	: Kebijakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam Pengelolaan Pendidikan tinggi Perspektif Maqashid Syariah
Metode	: Observasi, wawancara, dokumentasi

Demikian atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 26 November 2019

a.n. Dekan

Kaprodi MPI

Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si. ✎
NIP. 19590525 198503 1 005

Tembusan :

1. Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ybs

Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari Lokasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512474, 589621 Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : B.5964 /Un.02/BA/TL.00/12/2019

Memperhatikan Surat Ketua Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan nomor : B.1332/Un.02/DT/PG.00/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Rektor UIN Sunan Kalijaga memberikan ijin untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama	:	Riyani
NIM	:	18204090010
Prodi	:	Manajemen Pendidikan Islam

Untuk mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Tesis dengan judul "KEBIJAKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH " dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Kepala Biro AAKK.
2. Waktu Penelitian dari bulan Desember 2019 s.d. Januari 2020 dengan lokasi UIN Sunan Kalijaga.
3. Selama mengadakan Penelitian tidak mengganggu kegiatan Sivitas Akademika.
4. Menjaga keamanan dan keteribatan.
5. Selesai mengadakan Penelitian harap memberikan laporan tertulis kepada Rektor melalui Bagian Akademik Biro AAKK dengan dilampiri hasil Penelitiannya.

Demikian surat ini diterbitkan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Desember 2019

a.n Rektor
Kepala Biro AAKK



Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 6 Foto Dokumentasi



Wawancara Mahasiswa Pondok Pesantren di Nawasea



Wawancara Mahasiswa
Pondok di Nawasea

Wawancara Mahasiswa tentang
PBAK



Wawancara Wakil Rektor I



Wawancara Wakil Rektor III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara Wakil Rektor II



Wawancara Mahasiswi
Bercadar Mahasiswa



Wawancara
tentang PBAK



Wawancara Mahasiswi Bercadar

Lampiran 7 CURRICULUM VITAE

A. Profile Author

Name : Riyam
Place/Date of Birth : Rimbo Bujang, 19 August 1993
Home Address : Jl Lesmana Desa Perintis
Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Father : Yudilson
Mother : Yurnida

B. History of Education

SD N 73/VIII Perintis 2001-2006
SMP Uswatun Hasanah Padang Panjang 2007-2009
MA Ar-Risalah Ponorogo 2010-2013
S-1 UIN Sunan Kalijaga 2014-2018

C. Achievement/Award

(2019) Presentation entitled “Facilities and Infrastructure Management In TQM Perspective” at the Faculty Of Education, University Of Malaya

D. Experience The Organization

(2019) Member of committee in the international student programs at the FITK Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

E. The Scientific Work

1. Book

- a. (2019) Filsafat Pendidikan Islam (Kerangka Konseptual Pendidikan Islam di Era Modern)
- b. (2019) Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan (Teks, Konteks, dan Kontekstualisasinya di Indonesia)

2. Artikel/Journal

- a. (2018) Ilmu Al-Qur'an (IQ) Jurnal Pendidikan Islam berjudul “Implementasi Kemandirian dan Jiwa Sosial (Life Skills) Santri di Pesantren”

3. Research

(2018) Skripsi “Strategi Pengembangan Kecakapan Hidup (Life Skill) Personal Dan Sosial Santri di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Sleman Yogyakarta”

